



RTP OPERASIONAL TAHUN 2026

Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas
Jl. Prof. Suharso No.45, Mangunjaya, Purwokerto Lor, Kec.
Purwokerto Tim., Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53113

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel wajib dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu :

1. Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
2. Keandalan laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara;
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan.

1. Latar Belakang

Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggaran pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 adalah “Meningkatnya Produksi Pertanian” dengan indikator “*Persentase peningkatan produksi pertanian*”, melalui sasaran “*Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura, Perkebunan dan peternakan*”.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti RENSTRA 2025-2029, Renja maupun Perjanjian Kinerja.

2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RTP Operasional pada Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2020 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Penilaian Atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Memberikan pedoman dan arah yang jelas bagi pimpinan dan pelaksana dalam menangani risiko yang telah diidentifikasi, agar risiko tersebut dapat dikendalikan pada tingkat yang dapat diterima dan tidak menghambat pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah.

2. Tujuan

- a) Menentukan langkah pengendalian risiko secara sistematis agar setiap risiko strategis, operasional, dan pelayanan publik memiliki tindakan pengendalian yang jelas, terukur, dan dapat dilaksanakan;
- b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
- c) Menjamin efektivitas sistem pengendalian intern RTP;
- d) Mendukung pencapaian sasaran strategis dan kualitas pelayanan publik;
- e) Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengelolaan risiko.

4. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas berdasarkan Rencana Strategis Dinperten KP Tahun 2025-2029.

RTP Operasional berfokus pada pengendalian risiko dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat operasional untuk memastikan target output, mutu, waktu, biaya, dan kepatuhan dapat tercapai.

Pelaksanaan RTP melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Pertanian dan Kabupaten Banyumas secara umum cukup memadai. Penilaian terhadap kondisi lingkungan pengendalian yang dilakukan dengan survey persepsi terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas, diperoleh gambaran sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan survei persepsi pada 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian menunjukkan hasil bahwa semua sub unsur memadai.

Sedangkan berdasarkan reviu terhadap dokumen yaitu hasil audit Kinerja Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas Tahun 2024 menunjukkan hasil bahwa **terdapat 2 (dua) sub unsur yang kurang memadai** yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat. Adapun kelemahan-kelemahan pada 2 (dua) sub unsur tersebut adalah sebagai berikut :

1. Komitmen terhadap kompetensi

Dalam pelaksanaan kegiatan oleh Bidang Ketahanan Pangan masih terdapat kelemahan :

- Belum terdapat Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) mulai dari penyediaan gudang sampai dengan pemantauan/pengawasan dan

evaluasi CPPD, baru terbatas pada kewajiban Bupati untuk menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai CPPD. Jumlah CPPD belum mencapai proporsi yang ditentukan;

- Belum ada pedoman teknis yang mengatur kegiatan pasar murah baik terhadap titik lokasi maupun jenis bahan pokok dan bahan penting lainnya yang diintervensi;
- Distribusi bantuan pangan pada daerah rawan pangan belum tepat sasaran, Dimana penentuan lokus desa penerima hanya didasarkan pada kriteria Desa FSVA Prioritas 3, namun dalam pelaksanaannya pembagian dilakukan secara rata tanpa memperhitungkan kebutuhan yang sebenarnya pada masing-masing desa tersebut. Hal ini dikarenakan belum adanya identifikasi jumlah rumah tangga sasaran.

2. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

Terkait peran fasilitator dalam Pembangunan infrastruktur pertanian berupa Dam Parit yang ditunjuk untuk mendampingi kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan secara swakelola, dimana masih terdapat kelemahan :

- Terdapat selisih kurang volume terpasang Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Gendu Sari Desa Tunjung Kecamatan Jatilawang sejumlah 4,53 m3 dengan nilai Rp. 4.556.999;
- Terdapat selisih kurang volume terpasang Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Sari Jaya Desa Tinggarjaya Kecamatan Jatilawang sejumlah 1,94 m3 dengan nilai sebesar Rp. 1.957.000;
- Pekerjaan Pembangunan Dam Parit Kelompok Tani Sri Lestari Desa Gunungwetan Kecamatan Jatilawang berada di lokasi yang cukup tinggi dan telah terjadi sedimentasi, sehingga

pada saat turun hujan menimbulkan banjir. Bangunan tersebut belum memiliki parit yang berfungsi untuk menyalurkan air ke sawah sehingga tujuan Pembangunan Dam Parit tidak optimal.

B. RENCANA PENGUATAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dari hasil analisis lingkungan pengendalian (*Control Environment Evaluation*), kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu mendapat prioritas untuk diperbaiki, yaitu :

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Perbaikan	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	Komitmen terhadap kompetensi		
	- Mengevaluasi kinerja bidang, mulai dari penyusunan rencana kegiatan, pembagian kerja berdasarkan kompetensi SDM serta evaluasi pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinptan	Triwulan I, II Tahun 2026
2	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat		
	- Mengoptimalkan peran PPTK dan PPK dengan menetapkan fasilitator kegiatan yang dilakukan secara swakelola oleh Kelompok Penerima Bantuan	Kepala Dinptan	Triwulan I Tahun 2026

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran :

Form 1.a : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)

Form 1.b : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Banyumas

Form 1.c : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Kabupaten Banyumas

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan (strategis) pemerintahan daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah
2. Pengelolaan Risiko Strategis OPD; dan
3. Pengelolaan Risiko Operasional/kegiatan OPD.

Dengan memahami tujuan yang hendak dicapai pada tiap tingkatan, risiko pada setiap tingkatan tersebut dapat diidentifikasi dan dianalisis.

Visi RPJMD Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Banyumas yang telah disampaikan pada saat kampanye Pilkada tahun 2024, yaitu **“Mewujudkan Banyumas Produktif, Adil Dan Sejahtera”**. Visi Kabupaten Banyumas tahun 2025-2029 akan diwujudkan dengan pelaksanaan misi :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia;
2. Memperkuat ekonomi kerakyatan yang maju, mandiri dan menyejahterakan;
3. Memperkuat ketahanan pangan;
4. Meningkatkan pengembangan wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan;

5. Meningkatkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
6. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, melayani dan transparan guna mendorong peningkatan daya saing daerah.

Adapun tujuan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia;
 - b) Meningkatnya ketahanan pangan;
 - c) Meningkatnya ekonomi masyarakat dan menurunnya ketimpangan pendapatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Daya Saing Daerah, dengan sasaran :
 - a) Meningkatnya daya saing ekonomi daerah;
 - b) Meningkatnya pengembangan wilayah dengan infrastruktur yang berdaya saing;
 - c) Meningkatnya keberlanjutan lingkungan hidup;
 - d) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan Daerah berintegritas, adaptif, kolaboratif dan inovatif.

Tujuan dan Sasaran tersebut diterjemahkan melalui penetapan tujuan, sasaran dan indikator kinerja yang pencapaiannya menjadi tanggung jawab OPD.

Dalam upaya pencapaian misi tersebut, penetapan konteks risiko Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

Konteks	Kegiatan	Indikator
Risiko operasional	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase alsintan yang dimanfaatkan Persentase kinerja realisasi pupuk
	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani Persentase peningkatan kualitas SDG ternak yang dikelola
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanaman Pakan Ternak serta Pakan yang memenuhi standar pada unit usaha
	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengecer obat hewan yang menerapkan standar keamanan dan mutu obat hewan
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak yang memenuhi standar pada unit usaha
	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok ternak yang difasilitasi
	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan luas kawasan P2L yang dikembangkan
	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas lahan terjangkau oleh sumber-sumber air
		Luas lahan pertanian yang mendapatkan akses jalan usaha tani
		Jumlah prasarana peternakan yang layak
	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan populasi kambing perah di wilayah sumber bibit
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan
		Jumlah wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani

Konteks	Kegiatan	Indikator
	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah izin usaha peternakan yang diterbitkan
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sebaran penyakit hewan
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA
		Persentase kesesuaian program renja dengan renstra
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran :

Form 2.b : Penetapan konteks risiko operasional OPD Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi risiko-risiko yang ada. Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Rincian hasil identifikasi risiko dapat dilihat pada lampiran :

Form 3.b : Identifikasi Risiko Operasional Dinperten

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui FGD yang melibatkan ASN di lingkungan dinas yang menangani urusan pertanian Kabupaten Banyumas. Dari hasil survei tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan nilai tinggi dan beberapa risiko yang tidak tinggi namun dianggap perlu dilakukan tindak pengendalian karena dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan lainnya.

Berikut adalah daftar risiko prioritas dari hasil analisis risiko
Dinipertan Kabupaten Banyumas :

No	Resiko Prioritas	Kode Resiko	Skala Resiko
	Risiko Operasional		
1	Adanya intervensi dalam menentukan CPCL pembangunan prasarana pertanian (Fraud/ Kecurangan)	ROO.26.327. 22.22	16.00
2	Kualitas pekerjaan pembangunan prasarana pertanian yang rendah (Fraud/ Kecurangan)	ROO.26.327. 22.22	16.00
3	Tingginya kerusakan tanaman dan hewan ternak akibat bencana pertanian (Operasional)	ROO.26.327. 22.22	16.00
4	Pengawasan hewan dan produk asal hewan yang keluar dan/atau masuk ke Kab. Banyumas belum optimal (Kemitraan)	ROO.26.327. 22.22	16
5	Kehilangan Barang Milik Daerah (Pengelolaan aset)	ROO.26.327. 22.22	9
6	Keterlambatan proses pencairan anggaran (Pengelolaan Keuangan)	ROO.26.327. 22.22	6

D. PENGENDALIAN YANG DILAKUKAN

Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinipertan membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya. Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran : *Form 5: Formulir Kertas Kerja Daftar Risiko Prioritas*.

Penilaian terhadap pengendalian mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika :

- 1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran :

Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Form 7 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun pengendalian meliputi :

- a. Mengumpulkan data berupa RTP, peraturan perundang-undangan, kebijakan Pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan pengendalian yang akan dibangun;
 - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - c. Membuat atau menyempurnakan pengendalian;
 - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - e. Menyempurnakan rancangan pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - f. Menetapkan penerapan pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian Terhadap semua bentuk pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati.

BAB IV

RANCANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

1. Surat Edaran Bupati kepada unit kerja atas pemberlakuan kebijakan;
2. Kebijakan di-upload dalam situs resmi pemerintah daerah (antara lain JDIH) yang dapat diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan;
3. Sosialisasi/workshop/diseminasi yang dibuktikan misalnya dengan undangan, notulen/laporan pelaksanaan, daftar hadir, foto pelaksanaan,

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran :

Form 8 (kolom a – f). Pelaksanaan pengkomunikasian dilakukan pada Tahun 2023 ketika akan merealisasikan RTP.

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran, yaitu *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran yaitu, *Form 10 (kolom d-g, dan kolom j-k)*.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kabupaten Banyumas,



ARIF SUKMO BUWONO, S.T., M.M.
NIP. 19700512 199203 1 007

LAMPIRAN

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL
DINAS PERTANIAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2026	
Periode yang dinilai	: Tahun 2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pertanian	
OPD yang Dinilai	: DINPERTAN	
Sumber Data	: Renja DINPERTAN Tahun 2026	
Tujuan Strategis	: Meningkatnya produksi pertanian	
Program dan Kegiatan Utama yang terkait dengan tujuan strategis	1 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
	b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
	c	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
	d	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer
	e	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
	f	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain
	2 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
	a	Pengembangan Prasarana Pertanian
	b	Pembangunan Prasarana Pertanian
	c	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota
	3 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
	a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
	4 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
	a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
	5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	
	a	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan
	6 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
	a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
	b	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
	c	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
	d	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
	7 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Keluaran/Hasil Indikator Kegiatan	Persentase alsintan yang dimanfaatkan
Persentase kinerja realisasi pupuk		82,85%
Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani		3 Jenis
Persentase peningkatan kualitas SDG ternak yang dikelola		5%
Persentase Tanaman Pakan Ternak serta Pakan yang memenuhi standar pada unit usaha		20%
Persentase pengecer obat hewan yang menerapkan standar keamanan dan mutu obat hewan		90%
Persentase Benih/Bibit Ternak yang memenuhi standar pada unit usaha		15%
Jumlah kelompok ternak yang difasilitasi		1 Kelompok

	Persentase peningkatan luas kawasan P2L yang dikembangkan		8,69%		
	Luas lahan terjangkau oleh sumber-sumber air		100 Hektar		
	Luas lahan pertanian yang mendapatkan akses jalan usaha tani		150 Hektar		
	Jumlah prasarana peternakan yang layak		2 Unit		
	Persentase peningkatan populasi kambing perah di wilayah sumber bibit		2,5 %		
	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan		3 Kegiatan		
	Jumlah wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi		1 Wilayah		
	Cakupan Bina Kelompok Tani		100%		
	Jumlah izin usaha peternakan yang diterbitkan		50 Unit Usaha		
	Jumlah dokumen sebaran penyakit hewan		1 Dokumen		
	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)		1 Dokumen		
	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet		60%		
	Persentase unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan		15%		
	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA		100%		
	Persentase kesesuaian program renja dengan renstra		100%		
	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)		100%		
	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%		
	Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah		2 Angka		
	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)		100%		
	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		
	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik		70%		
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah		100%		
Informasi Lain					
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan		Indikator	Target 2026	
	1	a	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase alsintan yang dimanfaatkan	91,99%
				Persentase kinerja realisasi pupuk	82,85%
		b	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani	3 Jenis
				Persentase peningkatan kualitas SDG ternak yang dikelola	5%
		c	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanaman Pakan Ternak serta Pakan yang memenuhi standar pada unit usaha	20%
		d	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengecer obat hewan yang menerapkan standar keamanan dan mutu obat hewan	90%
		e	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak yang memenuhi standar pada unit usaha	15%
		f	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok ternak yang difasilitasi	1 Kelompok
	2	a	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan luas kawasan P2L yang dikembangkan	8,69%
			b	Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas lahan terjangkau oleh sumber-sumber air
		Luas lahan pertanian yang mendapatkan akses jalan usaha tani			150 Hektar
		Jumlah prasarana peternakan yang layak			2 Unit

	c	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan populasi kambing perah di wilayah sumber bibit	2,5 %
3	a	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan	3 Kegiatan
			Jumlah wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi	1 Wilayah
4	a	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	100%
5	a	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah izin usaha peternakan yang diterbitkan	50 Unit Usaha
6	a	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sebaran penyakit hewan	1 Dokumen
	b	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)	1 Dokumen
	c	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	60%
	d	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan	15%
7	a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA	100%
			Persentase kesesuaian program renja dengan renstra	100%
	b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	100%
	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
			Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	2 Angka
	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	100%
	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	70%
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	100%
Purwokerto, 31 Desember 2025 KEPALA DINPERTAN KABUPATEN BANYUMAS  ARIF SUKMO BUWONO, ST, MM. NIP. 197005201992031007				

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL OPD

Form 3.c

Nama OPD		:DINPERTAN							
Tahun Penilaian		: 2025							
Periode yang dinilai		: Tahun 2026							
Tujuan Strategis		: Meningkatnya produksi pertanian							
Sasaran Strategis OPD		: Meningkatnya Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan							
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pertanian							

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas komoditas Cabai							
		Produktivitas komoditas Kopi							
		Produksi Daging							
		Produksi Telur							
		Produksi Susu							
		Kontribusi penurunan emisi GRK kumulatif sektor Pertanian							
	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase alsintan yang dimanfaatkan	Rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi		Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada petani	Internal	C	Terdapat petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan	Petani
		Persentase kinerja realisasi pupuk							
	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah jenis benih unggul yang digunakan petani	Terbatasnya akses petani terhadap benih unggul		Kurangnya sosialisasi dan informasi kepada petani	Internal	C	Terdapat petani yang kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan	Petani
		Persentase peningkatan kualitas SDG ternak yang dikelola							
	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tanaman Pakan Ternak serta Pakan yang memenuhi standar pada unit usaha	Mutu benih/bibit yang beredar tidak seragam		Pengawasan proses produksi dan distribusi belum konsisten	Internal	C	Produktivitas hasil ternak dan tanaman pakan menurun	Petani
	Kegiatan Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase pengecer obat hewan yang menerapkan standar keamanan dan mutu obat hewan	Beredarnya obat hewan di tingkat pengecer yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu		Rendahnya pengetahuan pengecer tentang standar keamanan dan mutu obat hewan	Eksternal	C	Gangguan kesehatan ternak dan penurunan produktivitas	Petani
	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Benih/Bibit Ternak yang memenuhi standar pada unit usaha	Kepatuhan unit usaha terhadap standar teknis dan pelaporan yang masih rendah		Sosialisasi regulasi dan standar teknis belum optimal	Eksternal	C	Meningkatnya risiko peredaran benih/ bibit ternak bermutu rendah	Petani
	Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah kelompok ternak yang difasilitasi	Pekerjaan Pengadaan Bibit ternak tidak Sesuai Kontrak / Ketentuan		Lemahnya pengendalian internal oleh pengguna anggaran dalam penggunaan katalog elektronik dalam pengadaan barang / jasa oleh PPK	Internal	C	Adanya risiko kecurangan dalam pengadaan barang / jasa yang dilakukan melalui katalog elektronik tanpa kelengkapan dokumen referensi harga	Petani

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Jumlah Jenis Infrastruktur Peternakan yang Disediakan dalam Kondisi Baik Persentase pemenuhan prasarana pertanian							
	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan luas kawasan P2L yang dikembangkan	Terbatasnya akses petani terhadap benih unggul		Kurangnya petani penangkar benih	Eksternal	C	Produksi pertanian kurang optimal	Petani
	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Luas lahan terjangkau oleh sumber-sumber air	Adanya intervensi dalam menentukan CPCL pembangunan prasarana pertanian (<i>Risiko Fraud/ Kecurangan</i>)		Pihak tertentu melakukan intervensi dalam penentuan CPCL pembangunan prasarana pertanian	Eksternal	C	Pembangunan prasarana pertanian yang dilakukan tidak sesuai dengan peta pengembangan/potensi wilayah	Petani
		Luas lahan pertanian yang mendapatkan akses jalan usaha tani	Kualitas pekerjaan pembangunan prasarana pertanian yang rendah (<i>Risiko Fraud/ Kecurangan</i>)		Pekerjaan penyedia jasa konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai KAK	Internal	C	Prasarana pertanian yang dibangun cepat rusak	Petani
		Jumlah prasarana peternakan yang layak	Terbatasnya akses sarana produksi ke lahan pertanian		Belum terfasilitasinya akses jalan usaha tani	Eksternal	C	Tingginya biaya produksi dan rendahnya efisiensi usaha tani	Petani
	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan populasi kambing perah di wilayah sumber bibit	Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit belum optimal		Pelaksanaan pembinaan belum optimal	Internal	C	Jumlah bibit dalam kawasan semakin berkurang	Petani
3	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi							
		Persentase penurunan luas lahan gagal panen akibat bencana pertanian							
	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian yang dilakukan	Tingginya kerusakan tanaman dan hewan ternak akibat bencana pertanian		Lemahnya mitigasi bencana pertanian terhadap tanaman dan hewan ternak	Eksternal	C	Terjadinya gagal panen dan kematian ternak	Petani
		Jumlah wilayah terdampak bencana yang ditanggulangi							
4	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase petani kopi dan kelapa yang menerapkan GAP untuk peningkatan kualitas produk							

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
		Persentase kelompok tani yg naik kelas							
		Jumlah petani muda yang menerapkan hasil pelatihan bidang pertanian							
	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	Kelembagaan kelompok tani lemah dalam pengelolaan usaha		Penyuluhan lebih banyak berfokus pada transfer teknis budidaya, belum pada penguatan manajemen kelembagaan dan bisnis kelompok	Eksternal	C	Kelompok tani sulit berkembang dan berdaya saing, sehingga proses peningkatan kelas kelompok berjalan lambat	Petani
	5 PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase unit usaha yang mematuhi regulasi perizinan							
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah izin usaha peternakan yang diterbitkan	Masih banyak usaha peternakan yang melanggar peraturan dalam perizinan berusaha (Kemitraan)		Kurangnya monitoring dan evaluasi berkala dari pemerintah ke pelaku usaha yang berizin	Eksternal	C	Terjadi gangguan lingkungan akibat usaha peternakan	Petani
			Masih banyak usaha peternakan yang belum berizin		Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perijinan berusaha	Eksternal	C	Terjadi gangguan lingkungan akibat usaha peternakan	Petani
	6 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular							
		Persentase peningkatan unit usaha yang menerapkan persyaratan teknis kesmavet							
	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sebaran penyakit hewan	Keterjadian penyakit rabies masih tinggi (Kemitraan)		Penanganan penyakit rabies belum optimal	Eksternal	C	Penularan penyakit rabies dari hewan ke manusia	Petani
			Meningkatnya kejadian penyakit hewan		Pelaksanaan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan belum optimal	Eksternal	C	Meluasnya daerah terdampak penyakit hewan menular	Petani
	Kegiatan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan dan pengendalian lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya (HPM)	Tidak terkendalinya lalu lintas hewan dan produk hewan akibat dokumen pengawasan yang tidak memadai		Pemeriksaan dan pelaporan data HPM antar-wilayah belum terintegrasi	Eksternal	C	Peningkatan risiko penyebaran penyakit hewan	Petani

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase unit usaha yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet	Pengawasan hewan dan produk asal hewan yang keluar dan/atau masuk ke Kab. Banyumas belum optimal (Kemitraan)		Kesadaran pelaku usaha peternakan tentang keamanan hewan dan produk asal hewan rendah	Eksternal	C	Penyebaran penyakit dari dalam dan/atau luar Kab. Banyumas	Petani
			Unit Usaha tidak menerapkan prosedur pelaksanaan sesuai NKV		Kurangnya kesadaran pelaku usaha tentang NKV	Eksternal	C	Keamanan produk hewan pada unit usaha belum terjamin	Petani
			Kerusakan produk segar asal hewan yang beredar (Kemitraan)		Kurangnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terkait keamanan PSAH	Eksternal	C	Keamanan produk segar asal hewan (PSAH) yang beredar belum terjamin	Petani
	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Persentase unit usaha yang menerapkan kesejahteraan hewan	Sarana Prasarana usaha tidak memenuhi prinsip kesejahteraan hewan		Kurangnya informasi tentang kesejahteraan hewan	Eksternal	C	Produksi peternakan tidak optimal	Petani
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM Perangkat Daerah							
		Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah							
		Persentase IP ASN Pegawai pada Perangkat Daerah bernilai sedang - sangat tinggi							
		Nilai kematangan organisasi							
		Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kesesuaian Program Renja Perangkat Daerah dengan DPA							
		Persentase kesesuaian program renja dengan renstra							
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pertanggungjawaban anggaran (SPJ) terhadap pengajuan anggaran (NPD)	Keterlambatan proses pencairan anggaran		Dokumen SPJ yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibat ketidak telitian petugas administrasi dan PPTK dalam menyiapkan dokumen SPJ	Internal	C	Kinerja serapan anggaran tidak sesuai target kinerja	Dinpertan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
					Ketidak cermatan petugas administrasi dan PPTK dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan serta memperhitungkan kebutuhan anggaran dan kas sehingga Rencana Anggaran dan Kas (Angkas) pada aplikasi SIPD Penatausahaan tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran riil	Internal	C	- Angkas yang tidak mencukupi berdampak pada SPJ kegiatan tidak dapat dibayarkan sesuai jadwal pelaksanaan - Angkas yang terlalu tinggi menyebabkan deviasi yang tinggi antara target kinerja dengan realisasi anggaran dan fisik	Dinpartan
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlambatnya administratif pendukung operasional kerja internal OPD.		ketepatan waktu administrasi yang belum optimal	internal	C	terhambatnya kinerja kedinasan	Dinpartan
		Nilai pengelolaan arsip perangkat daerah	pengelolaan arsip dinamis (aktif dan inaktif) yang tidak sesuai dengan standar kearsipan		Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang belum terbentuk	internal	C	Terjadinya pelambatan dalam proses pencarian kembali (retrieval) dokumen saat dibutuhkan	Dipertan
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kesesuaian realisasi pengadaan BMD dengan rencana kebutuhan pengadaan barang milik daerah (RKBMD)	Terjadi ketidaksesuaian realisasi pengadaan dengan RKBMD		Proses reuiu terkadang kurang ketat, sehingga apa yang tercantum di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) berbeda dengan apa yang sudah disahkan di dokumen RKBMD	internal	C	Instansi gagal mencapai target persentase kesesuaian aset	Dinpartan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terjadinya keterlambatan pembayaran jasa/honorarium tenaga administrasi perangkat daerah dari jadwal yang telah ditentukan.		Lambatnya proses verifikasi dokumen dan kelengkapan administrasi	internal external	C	Potensi keluhan/komplain yang mengganggu kondusivitas kerja.	Penyedia Jasa
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	Kegagalan mempertahankan keandalan aset operasional akibat keterbatasan alokasi dana pemeliharaan rutin, yang memicu kerusakan massal/total sebelum masa manfaat aset habis.		Anggaran pemeliharaan rutin tidak mencukupi untuk mencakup seluruh aset yang mulai rusak	Internal	C	Kerusakan kecil pada aset dibiarkan tanpa perbaikan hingga menjalar menjadi rusak total.	Dinpartan
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Banyaknya aset daerah (kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan komputer) mengalami kerusakan dini/total sebelum masa manfaatnya habis.		Pengguna barang (pegawai/pejabat) tidak memiliki rasa kepemilikan sehingga mengoperasikan aset secara sembrono dan mengabaikan perawatan harian.	Internal	C	Produktivitas Kerja Turun: Fasilitas kantor yang rusak (AC mati, komputer lambat, kendaraan dinas mogok) menghambat kecepatan pelayanan administrasi pemerintahan.	Dinpartan

No	Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Risiko		Sebab			Dampak	
			Uraian	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	k	l
			Risiko Kehilangan Barang Milik Daerah (BMD)		Kelalaian, pencurian, , karakteristik aset barang peternakan di luar gudang dengan mobilitas tinggi maka risiko kehilangan menjadi sangat kritis. Aset lapangan seperti ini sangat rentan hilang akibat tertinggal di kandang kelompok peternak, tertukar, atau dibawa tanpa izin. Kehilangan BMD karena jangkauan luas, SDM Pengurus Barang hanya 1 BMD tersebar di UPT, beban kontrol berlebihan	Internal	C	Kerugian negara, sanksi disiplin, temuan BPK, tuntutan ganti rugi	Dinpartan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan program/ kegiatan perangkat daerah yang terpilih berdasarkan Renja yang akan diidentifikasi risiko

Kolom c diisi dengan indikator program/ kegiatan yang terpilih

Kolom d diisi dengan uraian risiko

Kolom e diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggung jawab/ berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom f diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine* , dan *Material*

Kolom g diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom h diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom i diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi. Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan

Kolom j diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah		: DINPERTAN		
Tahun Penilaian		: 2025		
Periode Penilaian		: Tahun 2026		
Tujuan Strategis		: Meningkatnya produksi pertanian		
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pertanian		
No	Risiko yang Teridentifikasi	Analisis Risiko		
		Skala Dampak	Skala Probabilitas	Skala Risiko
a	b	c	d	e = c x d
I	Risiko Operasional Perangkat Daerah			
1	Rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi	2.00	3.00	6.00
2	Terbatasnya akses petani terhadap benih unggul	3.00	3.00	9.00
3	Mutu benih/bibit yang beredar tidak seragam	3.00	3.00	9.00
4	Beredarnya obat hewan di tingkat pengecer yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu	4.00	3.00	12.00
5	Kepatuhan unit usaha terhadap standar teknis dan pelaporan yang masih rendah	4.00	3.00	12.00
6	Pekerjaan Pengadaan Bibit ternak tidak Sesuai Kontrak / Ketentuan	3.00	3.00	9.00
7	Adanya intervensi dalam menentukan CPCL pembangunan prasarana pertanian (Risiko Fraud/ Kecurangan)	4.00	4.00	16.00
8	Kualitas pekerjaan pembangunan prasarana pertanian yang rendah (Risiko Fraud/ Kecurangan)	4.00	4.00	16.00
9	Terbatasnya akses sarana produksi ke lahan pertanian	3.00	3.00	9.00
10	Pengembangan kawasan wilayah sumber bibit belum optimal	3.00	3.00	9.00
11	Tingginya kerusakan tanaman dan hewan ternak akibat bencana pertanian	4.00	4.00	16.00
12	Kelembagaan kelompok tani lemah dalam pengelolaan usaha	2.00	4.00	8.00
13	Masih banyak usaha peternakan yang melanggar peraturan dalam perizinan berusaha (Kemitraan)	4.00	3.00	12.00
14	Masih banyak usaha peternakan yang belum berizin	3.00	3.00	9.00
15	Keterjadian penyakit rabies masih tinggi (Kemitraan)	4.00	3.00	12.00
16	Meningkatnya kejadian penyakit hewan	4.00	3.00	12.00
17	Tidak terkendalinya lalu lintas hewan dan produk hewan akibat dokumen pengawasan yang tidak memadai	3.00	3.00	9.00
18	Pengawasan hewan dan produk asal hewan yang keluar dan/atau masuk ke Kab. Banyumas belum optimal (Kemitraan)	4.00	4.00	16.00
19	Unit Usaha tidak menerapkan prosedur pelaksanaan sesuai NKV	4.00	3.00	12.00
20	Kerusakan produk segar asal hewan yang beredar (Kemitraan)	4.00	3.00	12.00
21	Sarana Prasarana usaha tidak memenuhi prinsip kesejahteraan hewan	3.00	3.00	9.00
22	Keterlambatan proses pencairan anggaran	2.00	3.00	6.00
23	Terlambatnya administratif pendukung operasional kerja internal OPD.	2.00	3.00	6.00
24	pengelolaan arsip dinamis (aktif dan inaktif) yang tidak sesuai dengan standar kearsipan	2.00	3.00	6.00
25	Terjadi ketidaksesuaian realisasi pengadaan dengan RKBMD	3.00	3.00	9.00
26	Terjadinya keterlambatan pembayaran jasa/honorarium tenaga administrasi perangkat daerah dari jadwal yang telah ditentukan.	3.00	3.00	9.00
27	Kegagalan mempertahankan keandalan aset operasional akibat keterbatasan alokasi dana pemeliharaan rutin, yang memicu kerusakan massal/total sebelum masa manfaat aset habis.	2.00	2.00	4.00
28	Banyaknya aset daerah (kendaraan dinas, gedung kantor, peralatan komputer) mengalami kerusakan dini/total sebelum masa manfaatnya habis.	3.00	3.00	9.00
29	Risiko Kehilangan Barang Milik Daerah (BMD)	3.00	3.00	9.00

FORMULIR KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO OPERASIONAL PRIORITAS

Nama Perangkat Daerah		: DINPERTAN			
Tahun Penilaian		: 2025			
Periode Penilaian		: Tahun 2026			
Tujuan Strategis		: Meningkatkan produksi pertanian			
Urusan Pemerintahan		: Urusan Pertanian			

No	Risiko Prioritas	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f
	RISIKO OPERASIONAL OPD				
1	Adanya intervensi dalam menentukan CPCL pembangunan prasarana pertanian (Risiko Fraud/ Kecurangan)	16.00	DINPERTAN	Pihak tertentu melakukan intervensi dalam penentuan CPCL pembangunan prasarana pertanian	Pembangunan prasarana pertanian yang dilakukan tidak sesuai dengan peta pengembangan/potensi wilayah
2	Kualitas pekerjaan pembangunan prasarana pertanian yang rendah (Risiko Fraud/ Kecurangan)	16.00	DINPERTAN	Pekerjaan penyedia jasa konstruksi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sesuai KAK	Prasarana pertanian yang dibangun cepat rusak
3	Tingginya kerusakan tanaman dan hewan ternak akibat bencana pertanian	16.00	DINPERTAN	Lemahnya mitigasi bencana pertanian terhadap tanaman dan hewan ternak	Terjadinya gagal panen dan kematian ternak
4	Pengawasan hewan dan produk asal hewan yang keluar dan/atau masuk ke Kab. Banyumas belum optimal (Kemitraan)	16.00	DINPERTAN	Kesadaran pelaku usaha peternakan tentang keamanan hewan dan produk asal hewan rendah	Penyebaran penyakit dari dalam dan/atau luar Kab. Banyumas
5	Keterlambatan proses pencairan anggaran	6.00	DINPERTAN	Dokumen SPJ yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku akibat ketidak telitian petugas administrasi dan PPTK dalam menyiapkan dokumen SPJ	Kinerja serapan anggaran tidak sesuai target kinerja
				Ketidak cermatan petugas administrasi dan PPTK dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan serta memperhitungkan kebutuhan anggaran dan kas sehingga Rencana Anggaran dan Kas (Angkas) pada aplikasi SIPD Penatausahaan tidak sesuai dengan kebutuhan anggaran riil	- Angkas yang tidak mencukupi berdampak pada SPJ kegiatan tidak dapat dibayarkan sesuai jadwal pelaksanaan - Angkas yang terlalu tinggi menyebabkan deviasi yang tinggi antara target kinerja dengan realisasi anggaran dan fisik
6	Risiko Kehilangan Barang Milik Daerah (BMD)	9.00	DINPERTAN	Kelalaian, pencurian, , karakteristik aset barang peternakan di luar gudang dengan mobilitas tinggi maka risiko kehilangan menjadi sangat kritis. Aset lapangan seperti ini sangat rentan hilang akibat tertinggal di kandang kelompok peternak, tertukar, atau dibawa tanpa izin. Kehilangan BMD karena jangkauan luas, SDM Pengurus Barang hanya 1 BMD tersebar di UPT, beban kontrol berlebihan	Kerugian negara, sanksi disiplin, temuan BPK, tuntutan ganti rugi

Formulir Kertas Kerja
Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko

Nama Perangkat Daerah : DINPERTAN
 Tahun Penilaian : 2025
 Periode Penilaian : Tahun 2026
 Tujuan Strategis : Meningkatnya produksi pertanian
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pertanian

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
	RISIKO OPERASIONAL OPD						
1	Adanya intervensi dalam menentukan CPCL pembangunan prasarana pertanian (Risiko Fraud/ Kecurangan)	Pengawasan pekerjaan oleh tim pengawas dari Dinas Pekerjaan Umum	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring dan evaluasi berkala dari Tim Internal Dinperten dengan melibatkan Tim Kerja/Petugas dilapangan	Dinperten	Triwulan I, II, III dan IV
2	Kualitas pekerjaan pembangunan prasarana pertanian yang rendah (Risiko Fraud/ Kecurangan)	Penetapan CPCL berdasarkan pedoman teknis dan verifikasi lapangan dan Penyusunan dokumentasi dan pelaporan seluruh tahapan proses penepatan CPCL	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pengawasan oleh Tim Kerja dalam serta Penyusunan dokumentasi dan pelaporan seluruh tahapan proses penepatan CPCL	Dinperten	Triwulan I, II, III dan IV
3	Tingginya kerusakan tanaman dan hewan ternak akibat bencana pertanian	Gerdal OPT, mitigasi bencana, bantuan bahan gerdal, pengobatan dan pengobatan ternak	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pemetaan wilayah rawan, monitoring berbasis data real-time, dan evaluasi pasca-intervensi secara terukur	Dinperten	Triwulan I, II, III dan IV
4	Pengawasan hewan dan produk asal hewan yang keluar dan/atau masuk ke Kab. Banyumas belum optimal (Kemitraan)	Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), Surveilans penyakit hewan, pengawasan pasar dan produk asal hewan	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Penyusunan dan penerapan jadwal pengawasan terpadu lalu lintas hewan dan produk hewan pada titik distribusi, pasar hewan, dan sentra peternakan, serta Peningkatan frekuensi pelayanan kesehatan, Penguatan koordinasi dan pertukaran informasi lalu lintas ternak dengan instansi terkait	Dinperten	Triwulan I, II, III dan IV

No	Risiko Prioritas	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	E/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggungjawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
5	Keterlambatan proses pencairan anggaran	Meningkatkan pemahaman petugas administrasi keuangan dan PPTK perihal peraturan perundang-undangan yang berlaku perihal pengelolaan keuangan serta teknis perhitungan perencanaan penggunaan keuangan daerah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala kepada petugas administrasi keuangan dan pengelola keuangan	Dinpertan	Triwulan I, II, III dan IV
6	Risiko Kehilangan Barang Milik Daerah (BMD)	Inventarisasi BMD secara berkala (tahunan)	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Mengusulkan penerbitan SK Pengurus Barang Pembantu. Menyusun SOP pengelolaan BMD	Dinpertan	Triwulan I, II, III dan IV